BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya pandemi covid-19 mempunyai dampak besar dalam perubahan dunia. Sejak kasus positif virus covid-19 diumumkan di Indonesia di 2 Maret 2020, pemerintah menambah langkah penanganan penyelenggaraan jasa atau barang di masa pandemi global. Inpres No 4 Tahun 2020 memerintahkan semua Kementerian/Lembaga/Pemda mengambil langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergis. Penyelenggaraan jasa atau barang bagi percepatan penanganan covid-19.

Dasar hukum penyelenggaraan jasa atau barang yakni PP No 16 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Dari Pasal 59 PP No 16 Tahun 2018. Mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah aturan Badan Kebijakan Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah Lembaga Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2018 perihal Penanganan Penyelenggaraan jasa dan barang di Keadaan Darurat SE Kepala LKPP No.3 Tahun 2020. Catatan Penyelenggaraan jasa dan barang dalam rangka Covid-19. Metode pendekatan yang di gunakan Penelitian ini ialah hukum normatif, sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder, berbentuk buku dan aturan perundangan. Penelitian ini juga menganalisis bahan hukum melalui manajemen dan analisis untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah badan kebijakan penanggung jawab (Kepala LKPP SE) SE No. 4 Tahun 2020. Sehubungan dengan pelaksanaan tata cara verifikasi/klarifikasi kualifikasi serta negosiasi pemilihan pemasok selama wabah virus corona (covid-19) Pemberitahuan No.440/2622/SJ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Maret 2020 mengenai pembuatan gugus tugas untuk mempercepat pemrosesan.

Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah yang tidak konvensional dengan mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2020 di bawah ketentuan UU No 2 Tahun 2020. Badan serta kepala daerah membuat keputusan mendalam guna upaya meningkatkan penyelenggaraan jasa atau barang. Kebijakan

penyelenggaraan jasa atau barang saat pandemi di Kab Samosir tahun 2020 adalah pengadaan gula, telur dan vitamin C, dan pengadaan tersebut termasuk tindak pidana korupsi. Penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah bagi penanganan pandemi Covid-19 melalui:

1. Melalui Swakelola.
2. Melalui penyedia.

Pengadaan barang/jasa lewat swakelola yakni mendapat jasa atau barang yang dilaksanakan badan provinsi/instansi, lembaga/kementerian/badan kewilayahan, organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan Pengadaan oleh Pemasok Pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang untuk menghadapi keadaan darurat dilakukan bertahap. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pokja Percepatan Penanganan Covid 19 pada Lampiran Peraturan Daerah Kab. Samosir No 51 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Permintaan Jasa/Barang Pemerintah No 51 Tahun 2020 Pejabat Perencanaan dan Komitmen Perubahan penggunaan dana tak terduga untuk penanganan kecuali bencana alam Covid 19 mengacu pada ruang lingkup pengadaan untuk Kabupaten Samosir. Sebagai Pejabat Pembuat Janji (PPK), kegiatan pengadaan makanan tambahan bergizi bukan merupakan kegiatan Covid-19 karena tidak terkait langsung dengan penanganan situasi darurat. Pembelian gula, telur, dan vitamin C tidak dapat menggunakan peraturan LKPP No. SE Kepala. Pengadaan Nomor 13 Tahun 2020 mengacu pada pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Keppres. Nomor 16 Tahun 2020.

Sebagai pejabat otoritas, menjadi tanggung jawab pengguna anggaran untuk menangani bencana non alam dengan pengeluaran tidak terduga untuk menghadapi keadaan darurat Covid-19 Kab. Samosir (17 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020) yang bertentangan dengan angka 3 huruf a Surat Edaran Menteri RI No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020. Terkait pembentukan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Penyalahgunaan dana belanja tak terduga bencana dan tindak pidana korupsi untuk penanggulangan bencana non alam untuk menghadapi keadaan darurat Covid-19 di Kabupaten Samosir sebagai Sekda tahun 2020. Pasal 59 (1) Perpres No 16 Tahun 2018 terkait LKPP No 13 Tahun

2018. SE Kepala LKPP No. 4/2020.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Setiap Jasa Dan Barang di Masa Covid-19 Dapat Di Lakukan Pengadaan Langsung
2. Mengapa Pengadaan Gula, telur, Dan Vitamin C, Pada Perkara No 28/Pid.Sus-TPK/2022 PN. Mdn Harus Dilakukan Melalui Tender

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan jasa atau barang di masa pandemicovid-19.
2. Untuk mengetahui Lembaga Kebijakan penyelenggaraan jasa atau barang Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di harapkan agar bisa memberi Manfaat pengembangan ilmu pengetahuan terkait tinjauan yuridis penyelenggaraan jasa atau barang ketika masa pandemi covid-19 (Putusan No 28/Pid.Sus-TPK/2022 PN.Mdn), yang dimana studi kasus ini, bahwa sekretaris daerah kabupaten samosir telah melakukan penyelewengan kekuasaan dengan membuat peraturan Daerah terkait dana tak terduga, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 diamandemen dengan UU No 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP SUB pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Maka penelitian ini saya kerjakan agar mendapat manfaat bagi semua orang. Pengetahuan yang sudah ada sebagai bahan pengembangan pengetahuan baru. UU No 20 Tahun 2001. Terkait Pemberantasan Tipikor. jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP SUB pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Manfaat praktik

Dari hasil penelitian ini bisa di harapkan agar bermanfaat untuk praktisi hukum serta penegak hukum, akademisi menjadi sumber referensi mengenai bidang tinjauan yuridis penyelenggaraan jasa atau barang ketika covid-19. Disamping itu dapat menambah ilmu masyarakat yang ingin mengetahui pengadaan barang jasa ketika masa pandemi.

E. Kerangka Konsepsi

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa saat Covid-19 yakni kegiatan satuan kerja berbagai kementerian/lembaga/instansi daerah/instansi lain guna mendapat barang/jasa, prosesnya diawali perencanaan permintaan hingga selesainya semua aktivitas pengadaan barang/secara mandiri ataupun dengan menyediakan layanan yang disediakan oleh penyedia. Dari Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018, Badan Pengadaan (PPK) bagi pengadaan gula, telur, dan vitamin C juga tidak mencakup pengadaan barang/jasa di kondisi darurat. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Kabupaten Samosir Utara telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi Dana Penanggulangan Bencana Tak Terduga Covid 19 hingga merugikan keuangan negara. Oleh karena itu merugikan negara dan perekonomian tiap orang yang untuk kepentingan dirinya ataupun orang lain ataupun perusahaan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan ataupun kemudahan karena kedudukan atau kedudukannya bisa merugikan negara, dipidana seumur hidup ataupun minimum 1 tahun serta maksimum 20 tahun, atau denda minimum Rp50.000.000,00 serta maksimum Rp1.000.000.000,00.

F. Teori Manfaat Hukum

Teori kepentingan hukum di penelitian ini yakni teori pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah dengan prosedur darurat di beberapa aturan perundangan dalam rangka penanganan pandemi corona-19 dengan pengaturan rinci mengenai penyelenggaraan jasa atau barang. Lembaga Kebijakan Penyelenggaraan Jasa atau Barang Pemerintah No. 13 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan jasa atau barang bisa diadakan lewat dua cara, yakni swakelola ataupun lewat pemasok dari swakelola, yakni penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah yang mengikutkan, /lembaga/kementerian/badan daerah lainnya, LSM, organisasi masyarakat, pemerintah lain atau pun lembaga masyarakat internasional, atau pun pelaku komersial. Pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah lewat pemasok¹

¹ peraturan lembaga kebijakan penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah (Perlem LKPP) no. 13 tahun 2018 mengenai penyelenggaraan jasa atau barang untuk penanggulangan barang jasa pemerintah (SE Kepala LKPP) No. 3 tahun 2020 perihal penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk upaya penanggulangan corona virus disease 19 (covid-19). Surat edaran kepala lembaga kebijakan penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah (SE kepala LKPP) no. 4 tahun 2020 mengenai teknis penyelenggaraan pembuktian kualifikasi/klarifikasi/dan negosiasi dalam pemilihan penyedia dalam masa pandemi virus covid-19). PEPRES no 16 tahun 2018 mengenai penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah.